

PERPINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SUKAPURA DARI SUKARAJA KE MANONJAYA SERTA DAMPAKNYA (1828-1834)

Oleh:
Agus Budiman¹
Ryan Ardiansyah²

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan ialah metode sejarah yang menjadi bagian dari usaha untuk memberikan interpretasi dari suatu peristiwa dalam masyarakat dimasa lampau untuk memperoleh suatu formula baru dalam kehidupan masyarakat pada saat ini dan dapat meramalkan kehidupan dimasa yang akan datang. Adapun metode ini menggunakan empat langkah metode, yaitu: (1). Heuristik (2). Kritik Sumber/verifikasi (3). Interpretasi (4). Historiografi. Bukti-bukti sejarah peristiwa perpindahan ibukota Kabupaten Sukapura, telah diperoleh dari berbagai data-data yang memberikan bukti kongkrit pada sejarah sosial dan perekonomian tersebut pada judul skripsi ini. Data yang diperoleh dan digunakan untuk melakukan verifikasi mengenai peristiwa perpindahan ibukota adalah melakukan wawancara ke beberapa nara sumber terpercaya dan studi literatur atau kajian pustaka melalui proses membaca dan menelaah buku-buku serta sumber-sumber yang memiliki hubungan dengan topik.

Kata Kunci: *Ibukota dan Dampak Perpindahan*

ABSTRACT

The method applied on this study is historic method which promotes an attempt to interpret an occurrence in certain society in the past, to achieve a breakthrough in the present life. This method may also provide important prediction of what may come in the future. There have been four stages of method involved in this study, they are: (1) Heuristic (2) Critics to the source/verification (3) Interpretation (4) Historiography. The historical evidence of capital relocation of Sukapura regency from Sukaraja to Manonjaya has been obtained from various data which has also provided distinct evidence of what mentioned in the title of this long essay/undergraduate thesis. All data is collected by sources interview, and literature study, and bibliography toward reading and analyzing related book and sources.

Kata Kunci: *The capital and the impact of displacement*

PENDAHULUAN

Perpindahan ibukota Kabupaten Sukapura dari Sukaraja ke Manonjaya, merupakan salah satu masalah dalam sejarah lokal, khususnya sejarah Kabupaten Sukapura yang menarik untuk diteliti. Hal itu terutama disebabkan oleh empat hal.

Pertama, perhatian dan minat penulis terhadap sejarah lokal, khususnya sejarah daerah sendiri, karena daerah yang menjadi objek penelitian adalah daerah kelahiran penulis. Minat itu sejalan pula dengan program studi yang penululis tempuh, yaitu Program Studi

Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh.

Kedua, mengenai perpindahan ibukota Kabupaten Sukapura dari Sukaraja ke Manonjaya, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti.

Ketiga, masalah tersebut memiliki arti penting, karena perpindahan ibukota kabupaten merupakan bagian integral dari pemerintahan kabupaten yang bersangkutan.

Keempat, untuk meneliti masalah yang menjadi objek penelitian, sumber-sumbernya cukup tersedia dan dapat diperoleh.

Jurnal Artefak Vol. 2 No. 1 – Maret 2014 [ISSN: 2355-5726]

Hlm: 77 - 86

¹ Dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis

² Mahasiswa Pendidikan Sejarah

Berdasarkan hal-hal tersebut itulah maka masalah itu dipilih sebagai objek penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi ini, dengan judul Perpindahan Ibukota Kabupaten Sukapura Dari Sukaraja ke Manonjaya dan Dampaknya (1828-1834).

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan objek penelitian yang merupakan peristiwa di masa lampau, metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah yang mencakup empat tahap kegiatan. Pertama, heuristik yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber – sumber tertulis yang diperlukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pencarian sumber dilakukan di beberapa perpustakaan, terutama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

Kedua, kritik sumber terhadap sumber – sumber yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan kritik, baik dari segi internal maupun dari segi eksternal, untuk mengetahui keabsahan sumber dan isinya.

Ketiga, interpretasi, yaitu kegiatan pemaknaan atau penafsiran terhadap data, sehingga diperoleh fakta sejarah yang akurat.

Keempat, historiografi, yaitu merangkai fakta yang diperoleh, sehingga menghasilkan rekonstruksi peristiwa yang diteliti dalam bentuk uraian deskriptif-analisis.

PEMBAHASAN

Pasirpanjang Sebagai Ibukota Sementara Kabupaten Sukapura

Pada kenyataannya, mengubah suatu daerah menjadi kota yang statusnya penting itu tidak mudah. Meskipun Manonjaya memiliki kondisi yang strategis, namun daerah itu belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti halnya kantor sebagai fasilitas untuk menjalankan pemerintahan, atau masjid sebagai simbol berdirinya ibukota kabupaten. Setelah diputuskannya Manonjaya menjadi Ibukota Kabupaten Sukapura, di Manonjaya perlu dilakukan pembangunan terlebih dahulu untuk memenuhi keperluan jalannya pemerintahan.

Selama pembangunan berlangsung di Manonjaya, untuk sementara ibukota berkedudukan di Pasirpanjang. Pemerintah tentunya mempunyai alasan mengenai penempatan ibukota sementara di daerah

tersebut, alasan itu tidak mungkin berdasarkan keputusan tanpa pertimbangan dan mufakat. Jarak antara Pasirpanjang ke Manonjaya adalah 1 km, cukup dekat apabila dijadikan ibukota sementara agar pengawasan terhadap pembangunan di Manonjaya serta patrol ke wilayah – wilayah lain tetap dapat dijalankan dengan efisien. Lamanya Pasirpanjang menjadi ibukota yaitu sejak mulai dibangunnya Masjid Agung Manonjaya sejak tahun 1832 hingga selesai pembangunannya pada tahun 1834 (Marlina, 2007: 138).

Dilihat dari kondisi fisik, Pasirpanjang juga merupakan daerah yang cukup subur, tempatnya tidak terlalu berbukit dan udaranya sejuk. Banyak ditemukan pesawahan yang luas serta perairan jernih, kemungkinan besar berasal dari perairan di dataran tinggi sekitar Gunung Kembang. Gunung Kembang merupakan batas sebelah selatan distrik Manonjaya dengan distrik Cineam. Hingga saat ini Pasirpanjang merupakan suatu daerah padat penduduk, ada kemungkinan dikarenakan pernah menjadi ibukota selama dua tahun.

Di Pasirpanjang tidak ditemukan sebuah pola kota tradisional atau sarana – prasarana seperti yang terlihat di Manonjaya, karena pemerintah hanya merencanakan Pasirpanjang sebagai ibukota sementara. Hanya sebuah mushala kecil yang menurut kepercayaan masyarakat setempat pernah dijadikan tempat untuk menjalankan roda pemerintahan. Mushala tersebut kini sudah direnovasi dan diperkirakan sudah jauh lebih besar daripada aslinya.

Pembangunan Infastruktur Di Manonjaya



Gambar 1
Mesjid Agung Manonjaya 1889

Perpindahan Ibukota Kabupaten Sukapura dari Sukaraja Ke Manonjaya
Serta Dampaknya (1828-1834)
Agus Budiman & Ryan Ardiansyah



Gambar 2
Masjid Agung Manonjaya tahun 1880

Pembangunan kota Manonjaya tak lepas dari jasa komandan pembangunan yaitu Raden Tumenggung Danuningrat, adik dari Bupati Sukapura saati itu Raden Tumenggung Wiradadaha VIII. R.T. Danuningrat membangun Manonjaya berdasarkan pola kota tradisional di Priangan. Pada masa pemerintahan Hindia – Belanda ibukota Kabupaten di Priangan lazimnya memiliki ciri – ciri sebuah pola kota tradisional yang meniru pola kota Cirebon, di sebelah selatan alun-alun berdiri keraton (Pakungwati), di sebelah barat alun-alun berdiri mesjid resmi kerajaan (Sang Ciptarasa), dan sebelah utara alun-alun terdapat pasar.

Pola pusat demikian, tampaknya diikuti oleh kota-kota, bahkan desa-desa di bawah Kesultanan Cirebon. Pola pusat kota (Pemerintahan) demikian, masih tampak hingga sekarang, di wilayah Cirebon, baik di ibukota kabupaten maupun di desadesa. Tata kota seperti itu juga menjadi pola pusat kota kabupaten di wilayah Priangan, seperti kota Ciamis, Manonjaya, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Bandung, Cianjur (Hardjasaputra³, 1993:128). Sejalan dengan pernyataan tersebut, pola kota tradisional juga berlaku bagi pembangunan di Manonjaya, di Manonjaya terdapat Alun – alun besar, kediaman asisten residen (sekarang kewedanaan) dan Masjid Besar (D.G.Stibbe, et. al, 1939: 1651).

³ Sejarawan Priangan, beliau merupakan penemu hari jadi Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

⁴ menurut kepercayaan masyarakat di Manonjaya, kemungkinan besar mustaka tersebut ialah pemberian dari Syech Abdul Muhyi⁴ dari pamijahan. Unsur seni bangunan tradisional yang dapat dilihat pada ruang bangunan di bawah atap tumpang tiga, tepatnya pada

Masjid Agung Manonjaya sekarang terletak di Kecamatan Manonjaya. Masjid Agung Manonjaya dibangun pada tahun 1832 M, yang dikomandani oleh Patih Raden Wiratanuwangsa. Pembangunan masjid selesai pada tahun 1834 M, bersamaan dengan selesainya pembangunan infrastruktur pemerintahan Kabupaten Sukapura di Pasirpanjang. Baru pada tahun 1835 secara resmi ibukota Kabupaten Sukapura pindah dari Pasirpanjang ke Manonjaya. Pada waktu itu sudah dijumpai masjid dalam ukuran kecil atau sejenis musala. Bahkan Raden Tumenggung Danuningrat ketika merencanakan tata ruang Kota Manonjaya berpedoman pada tata letak masjid kecil yang sudah ada. Dalam konteks ini, keberadaan masjid jelas merupakan satu kesatuan dengan pembangunan tata ruang Kabupaten Sukapura di Harjawinangun pada waktu itu. Jadi masjid di Manonjaya, dari sejak dulu telah dipakai sebagai “tetenger” atau tugu komando untuk mengembangkan tata Kota Harjawinangun. Bisa saja keberadaan masjid tersebut sudah ada bersamaan dengan pertama berdirinya pemerintahan Nagara Sukapura yang berpusat di Sukakarta atau Sukaraja sekarang. Pembangunan Masjid Agung Manonjaya dapat diselesaikan selama kurang lebih 2 tahun, yaitu dari tahun 1832 M sampai dengan tahun 1834 M. Bersamaan dengan selesainya pembangunan masjid, secara resmi kegiatan pemerintahan kabupaten mulai dilaksanakan di Manonjaya pada tahun 1835 M, yang sebelumnya menempati wilayah Pasirpanjang yang sekarang menjadi salah satu desa di Kecamatan Manonjaya (Zainudin, 2014: 549-550).

Masjid Agung Manonjaya di desain dengan gaya khas bangunan eropa, berbeda dengan bentuk masjid pada umumnya. Sebagai pembeda yang paling mencolok dari masjid pada umumnya ialah atap masjid, jika masjid pada umumnya memakai kubah layaknya masjid – masjid di Timur Tengah, Masjid Agung Manonjaya memiliki atap yang menjulang tinggi dan terdiri dari tiga tumpang dengan genting seperti gedung – gedung milik pemerintahan Hindia Belanda. Pada puncak atapnya, terdapat suatu ornamen yang disebut mustaka⁴,

ruang utama masjid di tengah-tengah ruang shalat terutama pada “struktur saka guru”, saka guru ialah tiang penyangga masjid yang jumlahnya 10 buah. Masjid Agung Manonjaya yang baru saja selesai dibangun tidak sebesar pada zaman sekarang, pada waktu itu belum ada teras dan menara (Budi, 2002)

Di sebelah utara alun-alun terdapat Gedung Asisten Resident yang disebut dengan Loji, letaknya strategis dan arsitekturnya yang bercorak eropasentris sangat indah. Tepat di tengah – tengah halaman pendopo terdapat sebuah kolam dengan airnya yang jernih menambah keindahan gedung pendopo tersebut. Akan tetapi, meskipun tampak indah kondisi Pendopo di Manonjaya belum sempurna dan belum adanya pedaleman. Faktanya, kondisi pendopo jauh dari yang seharusnya, dimana pendopo tidak dilengkapi dengan benteng atau pagar.

Dari sisi keamanan, tidak adanya benteng atau pagar dapat mengganggu keamanan lingkungan pendopo, selain dari pada itu dengan tidak adanya benteng kewibawaan bangsawan menjadi turun di mata Pemerintah Kolonial karena rakyat jelata bisa masuk dengan seenaknya. Ada juga tempat berkumpulnya barisan prajurit yang disebut Tangsi. Letaknya disebelah timur alun-alun dan di depan mesjid. Barisan prajurit merupakan dampak Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825-1830. Barisan prajurit ini muncul sekitar tahun 1849. Fungsinya bukan seperti prajurit seperti saat penjajahan bangsa Jepang, melainkan berfungsi untuk menjaga tempat –tempat tertentu seperti penjara, gedung Asisten Resident dan sebagainya.

Dalam keadaan yang mendesak, parajurit ini bisa juga dibawa ke medan perang, jika Gubernur kekurangan serdadu dan hal ini pernah terjadi ketika perang Diponegoro berlangsung. Lalu di sebelah utara alun-alun, terdapat sebuah penjara dan rumah sakit. Tempat tersebut masih dalam wilayah Tangsi prajurit. Rumah sakit untuk saat ini letaknya tidak jauh dengan letak rumah sakit pada saat Manonjaya menjadi ibukota Kabupaten Sukapura. (Suntana, 2014: 9-14).

Gambar 3: Denah kota Manonjaya



Pembangunan Masjid Agung Manonjaya dapat diselesaikan selama kurang lebih 2 tahun, yaitu dari tahun 1832 M sampai dengan tahun 1834 M. Bersamaan dengan selesainya pembangunan masjid, secara resmi kegiatan pemerintahan kabupaten mulai dilaksanakan di Manonjaya pada tahun 1835 M, yang sebelumnya menempati wilayah Pasirpanjang yang sekarang menjadi salah satu desa di Kecamatan Manonjaya. Setelah Manonjaya resmi menjadi ibukota Kabupaten Sukapura, perdagangan di kota ini berkembang dengan pesat. Bahkan lokasi tersebut kemudian berkembang sebagai pusat perdagangan di kawasan Priangan Timur, Jawa Barat. Hal ini karena letaknya cukup strategis sebagai jalur jalan raya yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, di mana Masjid Agung Manonjaya sebagai transit para pendatang dari dan menuju kedua propinsi tersebut.

Daerah yang tak jauh dari Masjid Agung Manonjaya dijadikan pusat perdagangan dan perekonomian, sebagai anjang transaksi jual beli para pedagang asal Jawa Barat dengan para pedagang asal Jawa Tengah dan Jawa (Zainudin, 2014; 550). Di sebelah Timur tepatnya di alun – alun. Diduga kuat pusat kegiatan ekonomi atau pasar tradisional Kabupaten Sukapura pada periode Manonjaya yaitu berada di alun – alun tersebut, tepatnya disekitar pohon beringin⁵. Letaknya cukup strategis karena di sebelah utara alun – alun terdapat jalan raya besar antar provinsi, cukup besar jika digunakan untuk pawai besar. Jadi, jika para pedagang atau pembeli dari luar daerah singgah, mereka bisa langsung menemukan pasar tersebut.

Pemindahan Ibukota Kabupaten Sukapura Ke Manonjaya

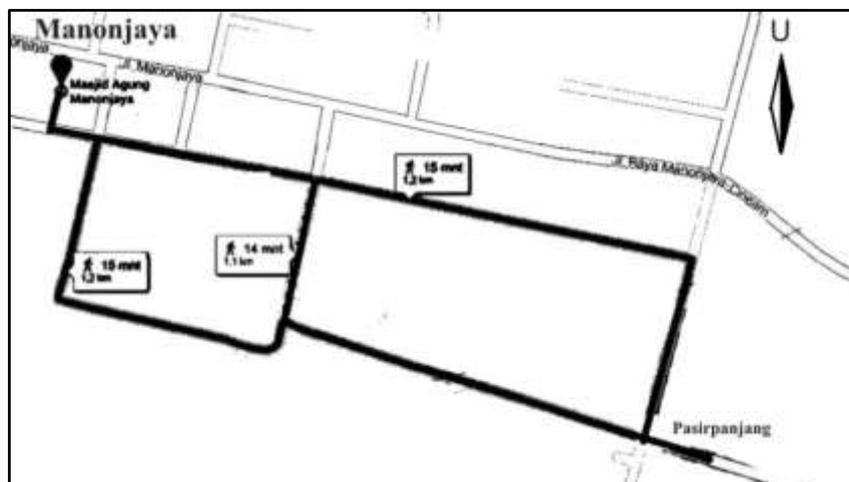
Ibukota Kabupaten Sukapura dipindahkan lagi dari Pasirpanjang ke Manonjaya, karena pembangunan Ibukota telah selesai . Proses pemindahan tidak berjalan panjang dan sulit karena jarak antara Pasirpanjang dan Manonjaya tidak terlampaui jauh (Marlina, 2007:138).

Proses pemindahan kemungkinan dilakukan dengan berjalan kaki melalui jalan raya utama yang menghubungkan antara Pasirpanjang dan Manonjaya. Bupati beserta keluarganya ikut berjalan kaki memimpin di barisan paling depan. Jika perjalanan dari Pasirpanjang ke Manonjaya dilakukan dengan

⁵ Pohon beringin merupakan simbol Ratu Wilhelmina.

Perpindahan Ibukota Kabupaten Sukapura dari Sukaraja Ke Manonjaya
Serta Dampaknya (1828-1834)
Agus Budiman & Ryan Ardiansyah

berjalan kaki, dapat diperkirakan hanya memakan waktu 15 menit, mengingat jalan yang dilalui cukup besar dan tak melalui medan yang berat. Hal tersebut ditunjukkan dari gambar berikut:



Gambar 4: Jalur perpindahan ibukota Kabupaten Sukapura dari Pasirpanjang ke Manonjaya

Keterangan:

Jalan yang dilalui proses perpindahan : 
Jalan raya : 

Akhirnya pada tahun 1834 setelah menempuh proses pembangunan selama dua tahun sejak 1832, Manonjaya (nama Harjawinangun diganti menjadi Manonjaya pada tanggal 10 Januari 1839) diresmikan sebagai Ibukota Kabupaten Sukapura dengan R.T. Wiradadaha VIII sebagai Bupati saat itu (Zainudin, 2010: 549-550).

Dampak Pemindahan Ibukota Kabupaten Sukapura

Pemindahan ibukota Kabupaten Sukapura dari Sukaraja ke Manonjaya merupakan peristiwa penting, karena memiliki dampak yang cukup berpengaruh baik bagi Sukaraja atau pun bagi Manonjaya sebagai penggantinya. Setelah ibukota kabupaten dipindahkan ke Manonjaya, status Sukaraja berubah menjadi distrik di bawah control-afdeeling Mangunreja dan afdeeling Sukapurakolot yang dipimpin langsung oleh patih dan asisten residen (Marlina, 2013: 165),

Status Manonjaya telah menjadi ibukota kabupaten, dalam pemerintahannya dipimpin langsung oleh Bupati yang dibantu oleh pejabat – pejabat pemerintahan, adapun struktur pemerintahan Kabupaten Sukapura periode Manonjaya ialah ketua (asisten residen), anggota (bupati, patih, wedana dan lain - lain), jaksa, hoofdpanghulu dan sekretaris (Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie, 1890).

Mobilitas sosial secara vertikal terjadi pada masyarakat Manonjaya setelah menjadi ibukota, karena status kota dan urusan – urusan pemerintahan di dalam lingkungan senantiasa berdampak pada kehidupan penduduk setempat. Hal tersebut menimbulkan pergerakan dalam kehidupan sosial, terbentuknya stratifikasi sosial baru.

Status sosial penduduk Manonjaya terdiri atas bangsa asing dan bangsa pribumi serta dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori elit pribumi dan pribumi. Elit pribumi terdiri atas Pejabat – pejabat pemerintah Tradisional dan golongan agama, sedangkan kategori pribumi terdiri atas pegawai rendah seperti prajurit dan rakyat biasa seperti petani dan pedagang.

Urutan pertama ditempati oleh golongan bangsa asing yaitu bangsa belanda, mereka masuk ke Manonjaya sebagai penguasa di seluruh bidang termasuk pemerintahan, sosial dan ekonomi. Meskipun dalam pemerintahannya hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja

bupati, sementara dalam proses eksukusi tetap menjadi hak Bupati.

Urutan kedua, yaitu Bangsa Tionghoa. Pada tahun 1830-an, Manonjaya berpenduduk pribumi 4,687 orang, diantaranya ada etnis Tionghoa sebanyak 22 orang (Thresnawati, 2009). Sejak masa VOC, orang Tionghoa berperan sebagai *tusschenpersoon* (perantara) antara VOC dan pihak pribumi, baik itu sebagai pedagang perantara (*tusschenhandelaar*) maupun pengumpul hasil bumi (Ong dalam Sunjayadi, 2006: 6). Di kehidupan perekonomian di Hindia, T.S Raffles⁶ dalam *The History of Java* (1817) mengatakan bahwa orang Tionghoa adalah “the life and soul of the commerce of the country (kehidupan dan jiwa perdagangan di negeri ini)”. Mereka memainkan peran yang sangat penting. Orang Tionghoa banyak yang berperan sebagai “perantara”. Berbagai kajian dan tulisan mengungkapkan hal tersebut. Didi Kwartanada dalam kata pengantar untuk buku Peter Carey mengungkapkan peran

golongan Tionghoa sebagai perantara atau “mesin pencetak uang”, baik oleh para raja maupun penguasa kolonial. Belanda yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia melihat bahwa golongan Tionghoa dapat menjadi ‘perantara’ antara golongan mereka (Belanda) dan pribumi (Sunjayadi, 2006: 4-6).

Status ketiga, ialah golongan bangsawan khususnya Bupati. Sejak pemerintahan Deandles, kedudukan Bupati-bupati di Priangan adalah aparat pemerintah Hindia Belanda, Bupati menerima gaji dari pemerintah Hindia Belanda.

Bupati di Manonjaya memperoleh penghasilan dari Preangerstelsel, meskipun gaji Bupati Sukapura tergolong paling rendah dibandingkan dengan gaji Bupati lainnya. Penghasilan bupati Sukapura periode Manonjaya ditentukan daripada hasil panen kopi, dan tunjangan. Waktu itu, jumlah uang gaji dan tunjangan bupati di Priangan tiap tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Gaji Bupati di Priangan

Penerima	Gaji	Tunjangan	Jumlah
Bupati Cianjur	F 20.000	F 24.000	f 44.000
Bupati Bandung	F 20.000	F 100.000	f 120.000
Bupati Sumedang	F 20.000	F 24.000	f 44.000
Bupati Limbangan	F 20.000	-	f 20.000
Bupati Sukapura	F 20.000	-	f 20.000

(Sumber: Hardjasaputra, 1993: 60)

Dalam realisasinya, bupati menerima gaji tiap bulan. Setiap kali menyerahkan kopi menyerahkan kopi, bupati mendapat persen sebesar f 1 per pikul (\pm 62 kilogram), dengan ketentuan tidak lebih dari f 30.000 untuk bupati Cianjur, f 82.000 untuk bupati Bandung, f 30.000 untuk bupati Sumedang, f 10.000 untuk bupati Limbangan, dan f 6000.00 untuk bupati Sukapura. Pendapatan para bupati itu ditambah lagi dengan hasil sawah-lungguh (kalungguhan) atau sawah carik, yang cukup luas (Hardjasaputra, 1993: 60).

Penghasilan bupati semakin melimpah karena memperoleh penghasilan dari bidang

keagamaan, antara lain dari zakat fitrah⁷ (Hardjasaputra, 2004 :37). Dengan demikian bupati akan menerima zakat fitrah setiap tahunnya atau lebih tepatnya setiap tanggal 1 Syawal⁸. Mengingat bahwa zakat fitrah hanya dapat diterima salah satunya oleh pengelola zakat, berarti waktu itu zakat fitrah dikelola oleh pemerintah daerah.

Kemudian golongan keempat ialah golongan agama, terdiri dari para pemuka agama Islam seperti kiyai dan santri. Golongan ini muncul akibat dibangunnya Masjid Agung Manonjaya sebagai pusat kegiatan keagamaan. Para kiyai dan santri yang tadinya melakukan

⁶ Thomas Stanford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Inggris di Indonesia, juga penulis buku “*The History of Java*”.

⁷ Zakat fitrah merupakan salah satu rukun islam, setiap muslim yang digolongkan kepada golongan berkewajiban membayar zakat fitrah dalam islam, maka orang muslim tersebut diwajibkan untuk membayar zakat fitrah dengan

nilai yang telah ditentukan dalam ajaran agama islam. Zakat fitrah akan diterima oleh orang – orang tertentu.

⁸ Syawal adalah salah satu bulan dalam kalender hijriah atau kalender Islam. Pada tanggal 1 Syawal merupakan hari raya umat muslim di seluruh dunia, hari raya itu disebut dengan *Idul Fitri*.

kegiatan keagamaan di langgar – langgar wilayah pelosok Manonjaya maka setelah dibangunnya Masjid Agung Manonjaya, mereka bisa melakukan kegiatan pengajian di Masjid Agung Manonjaya. Penduduk yang masih buta pendidikan agama Islam dapat mempelajari ajaran Islam dengan mudah. Masriah (Suntana, 2014:11-12) mengemukakan bahwa,

“dampak dari adanya beberapa sarana tersebut (Masjid Agung Manonjaya) melahirkan golongan baru dalam struktur sosial masyarakat. Kehadiran golongan santri yang menjadi simbol adanya perkembangan agama Islam di Manonjaya telah melahirkan struktur sosial baru dalam masyarakat. Santri merupakan sumber penting untuk membentuk sebuah opini dan kepemimpinan dalam masyarakat pribumi, kemudian para santri tersebut mewarnai berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Adanya golongan santri menyebabkan pergeseran kelas sosial. Ketika golongan priayi mengalami kemunduran dari segi kepercayaan karena akibat hubungan yang dekat dengan koloni, banyak masyarakat yang berpaling kepada golongan agama. Mereka menganggap bahwa pesantren merupakan tempat terbentuknya karakter yang seimbang antara pembangunan masyarakat serta pendidikan. Santri merupakan golongan terdidik yang dan ketika lulus dari pesantren akan menjadi ulama yang memiliki pendidikan tinggi, wawasan luas, karakter yang kuat serta mampu memenuhi tuntutan zaman dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat (Masriah dalam Suntana, 2014: 11-12).”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa golongan agama di Manonjaya merupakan penegak akidah ditengah – tengah bangsa Eropa yang kebudayaannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sosial golongan agama baik ulama maupun santri merupakan golongan yang disegani rakyat sekalipun oleh bangsawan pribumi, karena dianggap memiliki wawasan yang luas dan berilmu tinggi, terlebih mayoritas penduduk Manonjaya merupakan pemeluk agama Islam, mengingat ajaran Syekh Abdul

Muhyi sangat berpengaruh di Kabupaten Sukapura terlebih leluhur bupati pada waktu itu adalah murid – murid Syekh Abdul Muhyi. Golongan agama kerap memberikan dakwah bagi masyarakat di dalam dan di luar lingkungan langgar, ajarannya diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah tradisional daerah karena sesuai dengan pemahaman mereka.

Selanjutnya golongan ke lima, yaitu golongan prajurit. Selain golongan santri, pada saat Manonjaya menjadi ibukota Kabupaten Sukapura juga muncul golongan prajurit. Hal ini diakibatkan adanya pembangunan tangsi/barak bagi prajurit. Golongan prajurit bukan seperti militer sekarang, melainkan warga sipil yang diberi pendidikan semi militer. Cara disiplin prajurit hampir sama dengan militer, yang membedakan adalah fungsinya bukan berperan untuk keamanan negara baik luar maupun dalam (Suntana, 2014:12), melihat letak tangsi yang berada disekitar Kantor Asisten Residen, boleh jadi fungsinya adalah pengawal Asisten Residen. Berarti ada warga sipil atau rakyat jelata yang diberi pendidikan semi militer tersebut mengalami kenaikan status sosial.

Keenam merupakan golongan paling rendah dalam stratifikasi sosial masyarakat Manonjaya, yaitu golongan rakyat jelata. Golongan ini terdiri dari bangsa pribumi penduduk asli daerah Manonjaya yang mata pencahariannya rata – rata adalah bertani dan berdagang. Mereka tidak mengalami kenaikan kedudukan dalam stratifikasi sosial, terkecuali bagi perempuan yang “diangkat” menjadi selir oleh bupati atau dinikahi oleh salah satu keluarga bangsawan pribumi maka status sosial perempuan tersebut serta keluarganya dengan sendirinya akan terangkat (Hardjasaputra, 2015)⁹.

Berhubung saat itu tengah berjalan Preangerstelsel, rakyat jelata ini mengabdikan diri kepada pemerintah daerah dan secara tidak langsung terhadap pemerintah Hindia Belanda sebagai tenaga kerja budidaya kopi. Akan tetapi, seperti yang telah disampaikan sebelumnya¹⁰ yaitu karena Manonjaya merupakan daerah minus kopi, maka rakyat pribumi diwajibkan menanam nila.

Menanam nila tidak perlu di lahan sawah yang dipakai menanam padi, nila dapat ditanam

⁹ Prof. Sobana Harjasaputra menjelaskan pergeseran status sosial perempuan pribumi dalam suatu perbincangan ketika melakukan penelitian tanggal 5 Mei 2015 terkait dampak perpindahan ibukota Kabupaten Sukapura dari

Sukaraja ke Manonjaya terhadap kehidupan sosial masyarakat Manonjaya.

¹⁰ Ibid. hlm 14

di daerah – daerah perbukitan. Jadi, meskipun rakyat pribumi diwajibkan untuk menanam nila, rakyat masih bisa menanam padi sehingga tidak terjadi kelaparan. Mereka tidak mengalami krisis ekonomi karena mendapat ganti rugi dari pemerintah Hindia Belanda.

Dalam hal ini, rakyat tetap tidak disengsarakan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, karena mereka mendapat ganti rugi yang sepadan. (Muchsin, 2012: 12-13). Oleh karena itu di priangan apalagi di Manonjaya selama Preangerstelsel berlangsung, tidak pernah terjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti perang Jawa (Pangeran Diponegoro) dan perang paderi (Tuanku Imam Bonjol).

Berikut adalah bagan yang menggambarkan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial Masyarakat Manonjaya,



Gambar 4: Piramida stratifikasi sosial penduduk Manonjaya setelah menjadi ibukota Kabupaten.

PENUTUP

Simpulan

Pada tahun 1828 Bupati Wiradadaha VIII mengambil gagasan supaya ibukota Kabupaten Sukapura dipindahkan dari Sukaraja ke Manonjaya dengan latar belakang Manonjaya lebih strategis dari pada Sukaraja. Berikut adalah rincian alasan dan tujuan Manonjaya terpilih menjadi Ibukota Kabupaten Sukapura:

- 1) Manonjaya memiliki letak strategis, yang menghubungkan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Diharapkan dapat lebih mempermudah pengawasan dan pengontrolan terhadap wilayah administratif di sebelah timur yang baru bergabung.
- 2) Manonjaya ialah daerah penghasil nila yang unggul, sebagai komoditi yang dapat menutupi minus produksi kopi. Berhubung

pada saat itu pemerintah Hindia – Belanda tengah menjalankan Preangerstelsel, yang mana setiap daerah harus menyerahkan hasil panen kopi kepada pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu perpindahan ibukota tersebut bertujuan untuk membudidayakan nila.

Proses perpindahan mencakup beberapa tahap, seperti persiapan dan perpindahannya. Sebelumnya Ibukota Kabupaten berkedudukan di Pasirpanjang karena di Manonjaya perlu dilakukan pembangunan terlebih dahulu. Baru kemudian Perpindahan dilakukan pada tahun 1834 seiring dengan selesainya pembangunan kota.

Pemindahan ibukota ke Manonjaya menimbulkan berbagai dampak, ialah, pertama, bagi Sukaraja sebagai bekas ibukota berdampak terhadap berubahnya status dari Ibukota menjadi distrik di bawah control-afdeeling Mangunreja dan afdeeling Sukapurakolot yang pemerintahannya dipimpin oleh camat.

Kedua dampak perpindahan bagi Manonjaya/Manonjaya, ialah:

- 1) Manonjaya menjadi ibukota;
- 2) Terjadinya mobilitas horizontal, yaitu datangnya orang - orang pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat dari luar daerah Manonjaya;
- 3) Terjadinya mobilitas vertikal yang ditimbulkan oleh keberadaan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai penguasa. Lalu terciptanya pembagian kelas sosial terdiri atas 5 golongan yaitu:
 - a. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda;
 - b. Bangsa Tiongkok;
 - c. Bangsawan pribumi;
 - d. Golongan agama;
 - e. Prajurit;
 - f. Rakyat Jelata.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip, Dokumen, dan Naskah :

Hoofdcommitte. 1932.

Pangeling-ngeling 300 Taun Ngadegna Kabupaten Sukapura. Sukapura: tp Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie. 1890.

Batavia: Landsdrukkerij Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie. 1932.

Batavia: Landsdrukkerij Sastrahadiprawira, R. Memed. 1932.

“Manondjaja Dajeuh Narikolot”.
Priangan, No. 46.

Wirahadisoeria (Patih Pansiun Sumedang). Tth.
“Sejarah Sukapura”. Yayasan Wakaf
Pusaka Sukapura. Buletin.

Buku

- Stibbe, D.G, Sanbergen. 1939.
Encyclopaedie van Nederlandsch Indie
Achtste Deel.
- Falah, Miftahul. 2010.
Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942.
Bandung : Uga Tatar Sunda
- Hardjasaputra, Sobana. 2004.
Bupati di Priangan. Bandung : Pusat Studi
Sunda.
- Marlina, Itje. 2000.
Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat.
Bandung: Alqaprint
- _____, 2007.
Perubahan Sosial di Tasikmalaya (Suatu
Kajian Sosiologis Sejarah). Bandung :
Alqaprint.

Artikel / Makalah/ Jurnal

- Muhsin, Mumuh. 2012.
Dinamika Sosial-Ekonomi Abad ke 19.
Bandung: Fakultas Sastra Universitas
Padjadjaran.
- Setiabudi, Bambang. 2006.
Masjid Agung Manonjaya Bukti Sejarah
Perkembangan Tasikmalaya.
- Sunjayadi, Achmad. 2006.
Peran Kaum Tionghoa dalam Turisme
Kolonial di Hindia Belanda. Tesis S2,
Program Pascasarjana Ilmu Sejarah,
Universitas Indonesia.
- Suntana, Gilang. 2014.
Perpindahan Ibukota Kabupaten Sukapura
dari Manonjaya ke Tasikmalaya serta
Dampaknya terhadap Kehidupan
Pemerintahan dan Sosial Ekonomi (1901-
1937). Ciamis: Program Studi Pendidikan
Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Galuh
- Thresnawati, Euis. 2009.
Catatan Masa Lalu Kota Banjar Sebuah
Kota di Jawa Barat yang berupaya untuk
menjadi kota mandiri. Departemen
Kebudayaan dan Pariwisata
- Zainudin. 2014
Sejarah Masjid Agung Manonjaya:
Puslitbang Lektur dan Khazanah

Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Sumber Lain:

<https://www.google.co.id/maps/@-7.351451,108.307965,373m/data=!3m1!1e3>
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tasikmalaya

